

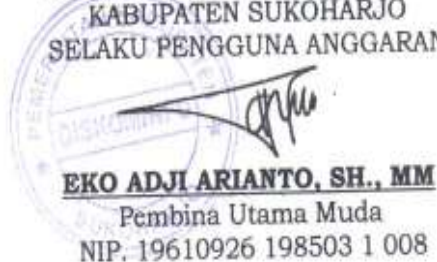
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat karunianya sehingga dapat kami selesaikan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019. Laporan Keuangan ini memuat segala transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo dalam jangka waktu satu tahun, juga memuat Laporan Asset, Laporan Persediaan, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel, disamping itu Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Akhir kata, kami sadari bahwa laporan keuangan ini belumah sempurna, sehingga kami mohon saran dan masukan, demi kemajuan dan perkembangan OPD kami.

Pt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



EKO ADJI ARIANTO, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198503 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN....	1
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN LAPORAN KEUANGAN	2
1.3 SISTEMATIKA	3
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN	5
2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN.....	5
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	9
3.1 TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	9
3.2 PENCAPAIAN TARGET APBD TA 2019	15
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	19
4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	19
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	19
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	19
4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	23
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	25
5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	25
5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA.....	29
5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	32
5.4 PENJELASAN POS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	33
BAB IV PENUTUP	34
6.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	34
6.2 NERACA.....	34
6.3 LAPORAN OPERASIONAL	34
6.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 perihal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pasal 184 ayat 1 dan 2 dijelaskan, bahwasanya Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah :

1.1.1 Maksud

Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.

1.1.2 Tujuan

Memenuhi ketentuan tentang tata cara pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah ;
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancanagn Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- p. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2014 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2019);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Nomor 81 Tahun 2019).

1.3 SISTEMATIKA

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan:

Bab I : Pendahuluan

Memuat informasi tentang : Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II : Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

Memuat informasi tentang : Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar Pencapaian Target APBD TA 2019

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang : Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan

Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi
Pemerintah

Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang : Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Bab VI : Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

2.1.1 Pendapatan

Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban. Sehingga dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya dibidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa menghambat kemajuan dunia usaha, bahkan sebaliknya dituntut mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Penggalian sumber – sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi daerah dapat terus dilakukan, baik dengan jalan intensifikasi maupun secara ekstensifikasi secara selektif, sehingga tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan

aktivitas ekonomi. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi yang semakin berkembang dalam masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi dari sektor ekonomi terhadap pembangunan akan dapat meningkat.

Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :
 - 1) Hasil Pajak Daerah
 - 2) Hasil Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan yaitu :
 - 1) Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak
 - 2) Dana Alokasi Khusus
 - 3) Dana Alokasi Umum
- c. Lain-lain Pendapatan.

Memperhatikan hal tersebut diatas upaya untuk mencapai target pendapatan daerah antara lain: :

- a. Melakukan Intensifikasi dan dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan pawa wajib pajak dan para wajib retribusi daerah.
- c. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- d. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi
- e. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

2.1.2 Belanja

Sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 penyusunan anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis belanja dan obyek selama satu tahun anggaran. Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dikelompokkan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Kabupaten Sukoharjo yang ditempuh adalah:

- a. Mengutamakan belanja yang bersifat wajib kemudian belanja lainnya pada setiap perencanaan belanja.
- b. Hemat, tidak mewah. Efisien, sesuai kebutuhan yang disyaratkan.
- c. Terarah terkendali sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dan kemampuan dana yang tersedia.
- d. Wajib menyediakan anggaran pendamping dan anggaran penunjang bagi pelaksanaan bantuan program, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun pihak lainnya sesuai denganketentuan yang disyaratkan.
- e. Selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diwajibkan yang dibatasi maupun yang dilarang.
- f. Kegiatan-kegiatan skala desa maupun kegiatan skala Dusun akan dibiayai melalui Dana Alokasi Desa sedangkan untuk kelurahan melalui program dan kegiatan diusulkan melalui Belanja Langsung APBD.

2.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan bagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang dimaksudkan untuk menyediakan dana jika terjadi defisit anggaran dan memanfaatkan dana jika terjadi surplus anggaran.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Meningkatnya Kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang akan dicapai. Hal tersebut nampak dari ditetapkannya tujuan, sasaran dan strategi yang berkaitan dengan kinerja keuangan sebagai berikut :

3.1.1 Tujuan yang ditetapkan

1. Terwujudnya pelayanan yang lebih baik dalam mengelola Kekayaan Daerah kepada masyarakat melalui upaya pengembangan dan optimalisasi potensi puskesmas.
2. Tersedianya fasilitas yang memadai, mencukupi kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan, yang pada akhirnya diharapkan akan memberikan sumbangan kontribusi berupa pendapatan yang lebih besar kepada PAD.
3. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam tahun 2019 telah ditetapkan sasaran, dan strategi yang meliputi program dan kegiatan serta kebijakan sebagaimana telah disajikan pada Kebijakan Keuangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.

3.1.2 Sasaran-sasaran yang ditetapkan

Sasaran – sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2019 adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah.
- c. Tercapainya disiplin aparatur.
- d. Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur daerah yang memadai.
- e. Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan.

- f. Terwujudnya penyusunan perencanaan SKPD yang baik.
- g. Berkembangnya sarana komunikasi, informasi dan media masa.
- h. Terwujudnya fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
- i. Terjalannya kerjasama informasi dengan mass media, hiburan rakyat dan jumpa monitor.
- j. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- k. Tersusunnya data sektoral Kabupaten Sukoharjo.
- l. Tercapainya fungsi persandian dan keamanan informasi.

3.1.3 Program dan kegiatan yang ditetapkan

Guna mencapai sasaran tersebut, telah ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - i. Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga
 - j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - k. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
 - b. Pengadaan mebeleur
 - c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
3. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
 - 1.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - 1.2 Study Banding
 - 1.3 Seminar/ Lokakarya
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - d. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
6. Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) , dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Forum SKPD
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan
7. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa, dengan kegiatan :
 - a. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

- b. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bidang Kehumasan
 - c. Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
 - d. Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Pengembangan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika
 - e. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
9. Program Persandian, dengan kegiatan :
- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Dukungan Persandian
 - b. Koordinasi Penyelenggaraan Persandian dan Informasi Pemerintah Daerah
 - c. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Data Manusia Persandian dan Pengamanan Informasi
10. Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan :
- a. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
 - b. Broadband Learning Center
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi dan Komunikasi
11. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media, dengan kegiatan :
- a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
 - b. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - c. Pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo.
12. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan :
- a. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
 - b. Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE)
 - c. Layanan Teknologi Informasi Desa

- d. Pengelolaan Pertanyaan Keluhan dan Saran Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi

3.1.4 Keluaran (Output) atau Hasil (Outcome) yang dicapai

Sasaran kinerja keuangan tahun 2019 pada umumnya telah tercapai. Hal tersebut ditandai dengan indikator-indikator keberhasilan program (output/outcome) sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - a. Terkirimnya surat sampai tujuan.
 - b. Terbayarnya jasa kebutuhan air, listrik, telepon.
 - c. Terbayarnya pajak kendaraan dinas.
 - d. Terbayarnya honor pengelola keuangan.
 - e. Terpeliharanya peralatan kerja.
 - f. Alat tulis kantor.
 - g. Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan.
 - h. Terpenuhinya alat listrik dan penerangan bangunan kantor.
 - i. Terpenuhinya jasa kebersihan, peralatan dan perlengkapan kantor.
 - j. Tersedianya surat kabar/ majalah.
 - k. Terpenuhinya kebutuhan makanan minuman kantor.
 - l. Tersedianya biaya perjalanan dinas.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - a. Tersedianya kendaraan dinas/ operasional.
 - b. Terpenuhinya kebutuhan lemari arsip.
 - c. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Terwujudnya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - a. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur daerah.

- b. Study banding keluar daerah.
 - c. Terlaksananya kursus singkat/ pelatihan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- a. Tersusunnya LAKIP dan LRA OPD.
 - b. Tersusunnya laporan keuangan semesteran.
 - c. Tersusunnya laporan keuangan bulanan.
 - d. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun.
6. Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- a. Terselenggaranya forum OPD.
 - b. Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran.
7. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah.
- a. Tersusunnya data statistik sektoral.
8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa.
- a. Tersedianya bandwidth dan aplikasi teknologi informasi.
 - b. Tersedianya layanan informasi publik.
 - c. Tersedianya cellplan.sukoharjokab.go.id.
 - d. Terselenggaranya sosialisasi tentang manfaat menara telekomunikasi.
 - e. Tersedianya server aplikasi dan data.
9. Program Persandian.
- a. Tersedianya sarpras pendukung persandian.
 - b. Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan persandian lintas sektoral.
 - c. Terselenggaranya bimtek persandian dan keamanan informasi.
10. Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi dan Informasi.
- a. Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang TIK.
 - b. Terselenggaranya bimbingan teknis computer berbasis internet.

- c. Terorganisirnya KIM dan FK Metra Kabupaten Sukoharjo.
- 11. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media.
 - a. Terselenggaranya peringatan hari besar di Kabupaten Sukoharjo.
 - b. Terselenggaranya LPPL TOP FM.
- 12. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
 - a. Terpeliharanya fungsi website dan sms gateway.
 - b. Terlaksananya SPSE.
 - c. Tersedianya layanan internet dan intranet desa se-Kabupaten Sukoharjo serta fasilitasi system informasi desa.
 - d. Terselenggaranya pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPORSP4N.

3.1.5 Hambatan/permasalahan dan upaya pemecahan masalah

1. Hambatan/Permasalahan

Tidak ada

2. Upaya pemecahan

Tidak ada

3.2 PENCAPAIAN TARGET APBD TA 2019

Penjelasan pencapaian kinerja keuangan tahun 2019 sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD adalah sebagai berikut :

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah dari Kode Rekening Retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan dianggarkan Rp.20.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 17.154.000,00 atau 85,77%.

3.2.2 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai dianggarkan Rp. 2.945.032.000,00 realisasinya sebesar Rp. 2.503.155.960,00 atau 85,00% dengan rincian:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Gaji pokok PNS/ Uang representasi	1.434.983.000	1.284.806.300	89,53%
2	Tunjangan keluarga	145.210.000	128.782.248	88,69%
3	Tunjangan jabatan	183.084.000	152.150.000	83,10%
4	Tunjangan fungsional	48.160.000	43.200.000	89,70%
5	Tunjangan fungsional umum	30.251.000	26.685.000	88,21%
6	Tunjangan beras	85.014.000	62.281.200	73,26%
7	Tunjangan PPh/ Tunjangan khusus	22.658.000	8.899.017	39,28%
8	Pembulatan gaji	22.000	17.475	79,43%
9	Asuransi	47.406.000	36.059.843	76,07%
10	Asuransi jaminan kecelakaan kerja	3.444.000	2.621.546	76,12%
11	Asuransi jaminan kematian	10.332.000	7.864.641	76,12%
12	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	933.468.000	749.788.690	80,32%
13	Insentif pemungutan retribusi daerah-pemakaian kekayaan daerah	1.000.000	-	0,00%

3.2.3 Belanja Langsung

Belanja langsung yang terdiri dari :

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp.911.672.000,00 realisasinya sebesar Rp.857.805.000,00 atau 94,09% yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	669.795.000	647.795.000	96,72%
2	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	11.350.000	10.000.000	88,11%
3	Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan	5.600.000	4.600.000	82,14%
4	Honorarium pengelola keuangan	108.000.000	81.000.000	75,00%
5	Uang lembur pns	104.727.000	102.210.000	97,60%
6	Uang lembur non pns	12.200.000	12.200.000	100,00%

Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp.5.020.981.000,00 realisasinya sebesar Rp.4.789.184.637,00 atau 95,38% yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja alat tulis kantor	129.549.000	129.231.499	99,75%
2	Belanja alat listrik dan elektronik	4.000.000	4.000.000	100,00%
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.300.000	3.300.000	100,00%
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.160.000	9.160.000	100,00%
5	Belanja vandel, plakat dan cinderamata	2.250.000	1.950.000	86,67%
6	Belanja telepon	37.202.000	20.396.047	54,83%
7	Belanja air	3.600.000	-	0,00%
8	Belanja listrik	72.000.000	59.129.090	82,12%
9	Belanja surat kabar/ majalah	5.000.000	4.992.000	99,84%
10	Belanja kaw at/ faksimili/ internet/ intranet/ tv kabel/ tv satelit	1.652.500.000	1.650.243.786	99,86%
11	Belanja paket pengiriman	250.000	65.000	26,00%
12	Belanja dekorasi	6.750.000	6.750.000	100,00%
13	Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ narasumber	120.100.000	93.400.000	77,77%
14	Belanja jasa tenaga harian lepas	308.160.000	230.810.000	74,90%
15	Belanja jasa petugas/ pendukung kegiatan	4.250.000	4.250.000	100,00%
16	Belanja jasa akomodasi	3.600.000	3.600.000	100,00%
17	Belanja jasa pentas/ atraksi	10.500.000	10.500.000	100,00%
18	Belanja jasa perangkat lunak	1.051.967.000	1.031.467.000	98,05%
19	Belanja jasa service	7.000.000	6.957.210	99,39%
20	Belanja penggantian suku cadang	12.080.000	11.219.702	92,88%
21	Belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas	137.570.000	114.760.828	83,42%
22	Belanja pajak kendaraan bermotor	25.000.000	6.733.575	26,93%
23	Belanja cetak	10.360.000	10.355.000	99,95%
24	Belanja penggandaan	49.723.000	38.905.600	78,24%
25	Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat	11.150.000	11.150.000	100,00%
26	Belanja sewa ruang rapat/ pertemuan	15.000.000	15.000.000	100,00%
27	Belanja sewa meja kursi	4.850.000	4.850.000	100,00%
28	Belanja sewa tenda/ rumah kajang	15.900.000	15.900.000	100,00%
29	Belanja sewa pakaian adat/ tradisional	1.500.000	1.500.000	100,00%
30	Belanja sewa pengeras suara (sound system)	26.000.000	26.000.000	100,00%
31	belanja sewa panggung/ sarana pentas	1.000.000	1.000.000	100,00%
32	Belanja sewa alat/ sarana IT	124.150.000	120.900.000	97,38%
33	Belanja sewa alat/ sarana keamanan	1.000.000	1.000.000	100,00%
34	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	29.060.000	28.539.000	98,21%
35	Belanja makanan dan minuman rapat	45.885.000	45.335.000	98,80%
36	Belanja makanan dan minuman tamu	4.500.000	4.120.000	91,56%
37	Belanja makanan dan minuman kegiatan	202.800.000	197.790.000	97,53%
38	Belanja pakaian dinas harian	8.750.000	8.750.000	100,00%
39	Belanja pakaian dinas lapangan	5.250.000	5.250.000	100,00%
40	Belanja perjalanan dinas luar daerah	514.395.000	510.424.300	99,23%
41	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	40.000.000	40.000.000	100,00%
42	Belanja kepesertaan	30.420.000	26.000.000	85,47%
43	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	98.000.000	98.000.000	100,00%
44	Belanja pemeliharaan jaringan	140.500.000	140.500.000	100,00%
45	Belanja jasa konsultasi perencanaan	35.000.000	35.000.000	100,00%

b. Belanja Modal

Belanja modal dianggarkan sebesar Rp.1.310.200.000,00 realisasinya sebesar Rp.1.293.433.000,00 atau 98,72% terdiri dari Belanja modal peralatan dan mesin.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengadaan kendaraan bermotor penumpang	245.500.000	245.425.000	99,97%
2	pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use)	201.650.000	200.450.000	99,40%
3	Pengadaan komputer unit jaringan	335.000.000	331.259.500	98,88%
4	Pengadaan personal komputer	36.900.000	36.900.000	100,00%
5	Pengadaan peralatan komputer mainframe	140.500.000	140.500.000	100,00%
6	Pengadaan peralatan personal komputer	30.000.000	30.000.000	100,00%
7	Pengadaan peralatan jaringan	100.000.000	97.250.000	97,25%
8	Pengadaan lemari dan arsip pejabat	191.650.000	182.724.000	95,34%
9	Pengadaan alat komunikasi telephone	29.000.000	28.924.500	99,74%

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 59 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 1 entitas pelaporan di DPPKAD, untuk tahun anggaran 2019 seluruh Entitas Akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan pengetahuan dari seluruh SKPD dalam menyusun Laporan Keuangan.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.3.1. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak

untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
atau

- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

4.3.2. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

4.3.3. Aktiva tetap

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- b. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- d. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

- e. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- f. Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak,

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	<p>biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.</p> <p>Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan</p>

- g. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
 - h. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
 - i. Penyusutan
 1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
 2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- 4.3.4. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan *biaya perolehan*.
- 4.3.5. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Secara umum kebijakan akuntansi yang telah diterapkan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, antara lain :

- a. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui ***pada saat penyusunan laporan keuangan*** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; atau
 2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
- b. Pengakuan persediaan:
 1. Persediaan diakui:
 - pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
 2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- c. Pengakuan Aktiva tetap
 1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
 2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Berwujud;
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

d. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo adalah Pendapatan Asli Daerah-LRA.

Perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

	2019		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Asli Daerah-LRA	20.000.000	17.154.000	(2.846.000)

Pendapatan Asli Daerah-LRA setelah Perubahan ditargetkan sebesar Rp.20.000.000,00 realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA. 2019 sebesar Rp.17.154.000,00 atau 85,77%.

Perbandingan realisasi Pendapatan-LRA tahun 2019 dengan realisasi Pendapatan-LRA tahun 2018, adalah sebagai berikut:

	2019	2018
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LRA	17.154.000	977.432.080

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tersebut secara rinci dengan komposisi sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah-LRA	2019		Lebih/ (Kurang)	%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan	20.000.000	17.154.000	(2.846.000)	-14,23%
Jumlah	20.000.000	17.154.000	(2.846.000)	-14,23%

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA ini merupakan pendapatan dari Retribusi Penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp. 17.154.000,00 lebih kecil 14,23% & dari target sebesar Rp. 20.000.000,00.

5.1.2 BELANJA LANGSUNG

	2019		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja langsung	7.242.853.000	6.940.422.637	(302.430.363)

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari sd 31 Desember 2019 Meliputi:

Belanja	2019		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Pegawai	911.672.000	857.805.000	(53.867.000)
Belanja Barang Jasa	5.020.981.000	4.789.184.637	(231.796.363)
Belanja Modal	1.310.200.000	1.293.433.000	(16.767.000)
Jumlah	7.242.853.000	6.940.422.637	(302.430.363)

Perbandingan realisasi belanja daerah tahun 2019 dengan realisasi belanja daerah tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Belanja:		2019	2018
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Belanja Pegawai	857.805.000	3.345.070.116
2)	Barang Jasa	4.789.184.637	4.976.952.377
3)	Belanja Modal	1.293.433.000	436.660.000
	Jumlah	6.940.422.637	8.758.682.493

Penjelasan belanja adalah sebagai berikut :

- 1. Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

Perbandingan realisasi belanja operasi tahun 2019 dengan realisasi belanja operasi tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi	2019		Lebih/ (Kurang)	2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	911.672.000	857.805.000	(53.867.000)	3.345.070.116
Belanja Barang/Jasa	5.020.981.000	4.789.184.637	(231.796.363)	4.976.952.377
Jumlah	5.932.653.000	5.646.989.637	(285.663.363)	8.322.022.493

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai periode 1 Januari sd 31 Desember 2019.
Terdiri dari:

Belanja Pegawai		2019		Lebih/ (Kurang)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a	Gaji & Tunjangan	2.945.032.000	2.503.155.960	(441.876.040)
b	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	669.795.000	647.795.000	(22.000.000)
c	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	11.350.000	10.000.000	(1.350.000)
d	Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan	5.600.000	4.600.000	(1.000.000)
e	Honorarium pengelola keuangan	108.000.000	81.000.000	(27.000.000)
f	Uang lembur PNS	104.727.000	102.210.000	(2.517.000)
g	Uang lembur non PNS	12.200.000	12.200.000	-
Jumlah		3.844.504.000	3.348.760.960	(495.743.040)

Belanja Barang dan Jasa		2019		Lebih/ (Kurang)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Belanja alat tulis kantor	129.549.000	129.231.499	(317.501)
2	Belanja alat listrik dan elektronik	4.000.000	4.000.000	-
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.300.000	3.300.000	-
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.160.000	9.160.000	-
5	Belanja vandel, plakat dan cinderamata	2.250.000	1.950.000	(300.000)
6	Belanja telepon	37.202.000	20.396.047	(16.805.953)
7	Belanja air	3.600.000	-	(3.600.000)
8	Belanja listrik	72.000.000	59.129.090	(12.870.910)
9	Belanja surat kabar/ majalah	5.000.000	4.992.000	(8.000)
10	Belanja kawat/ faksimili/ internet/ intranet/ tv kabel/ tv satelit	1.652.500.000	1.650.243.786	(2.256.214)
11	Belanja paket pengiriman	250.000	65.000	(185.000)
12	Belanja dekorasi	6.750.000	6.750.000	-
13	Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ narasumber	120.100.000	93.400.000	(26.700.000)
14	Belanja jasa tenaga harian lepas	308.160.000	230.810.000	(77.350.000)

Belanja Barang dan Jasa	2019		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
15 Belanja jasa petugas/ pendukung kegiatan	4.250.000	4.250.000	-
16 Belanja jasa akomodasi	3.600.000	3.600.000	-
17 Belanja jasa pentas/ atraksi	10.500.000	10.500.000	-
18 Belanja jasa perangkat lunak	1.051.967.000	1.031.467.000	(20.500.000)
19 Belanja jasa service	7.000.000	6.957.210	(42.790)
20 Belanja penggantian suku cadang	12.080.000	11.219.702	(860.298)
21 Belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas	137.570.000	114.760.828	(22.809.172)
22 Belanja pajak kendaraan bermotor	25.000.000	6.733.575	(18.266.425)
23 Belanja cetak	10.360.000	10.355.000	(5.000)
24 Belanja penggandaan	49.723.000	38.905.600	(10.817.400)
25 Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat	11.150.000	11.150.000	-
26 Belanja sewa ruang rapat/ pertemuan	15.000.000	15.000.000	-
27 Belanja sewa meja kursi	4.850.000	4.850.000	-
28 Belanja sewa tenda/ rumah kajang	15.900.000	15.900.000	-
29 Belanja sewa pakaian adat/ tradisional	1.500.000	1.500.000	-
30 Belanja sewa pengeras suara (sound system)	26.000.000	26.000.000	-
31 belanja sewa panggung/ sarana pentas	1.000.000	1.000.000	-
32 Belanja sewa alat/ sarana IT	124.150.000	120.900.000	(3.250.000)
33 Belanja sewa alat/ sarana keamanan	1.000.000	1.000.000	-
34 Belanja makanan dan minuman harian pegawai	29.060.000	28.539.000	(521.000)
35 Belanja makanan dan minuman rapat	45.885.000	45.335.000	(550.000)
36 Belanja makanan dan minuman tamu	4.500.000	4.120.000	(380.000)
37 Belanja makanan dan minuman kegiatan	202.800.000	197.790.000	(5.010.000)
38 Belanja pakaian dinas harian	8.750.000	8.750.000	-
39 Belanja pakaian dinas lapangan	5.250.000	5.250.000	-
40 Belanja perjalanan dinas luar daerah	514.395.000	510.424.300	(3.970.700)
41 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	40.000.000	40.000.000	-
42 Belanja kepesertaan	30.420.000	26.000.000	(4.420.000)
43 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	98.000.000	98.000.000	-
44 Belanja pemeliharaan jaringan	140.500.000	140.500.000	-
45 Belanja jasa konsultasi perencanaan	35.000.000	35.000.000	-
JUMLAH	5.020.981.000,00	4.789.184.637,00	(231.796.363,00)

2. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk Perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset lainnya.

Realisasi belanja modal pada TA. 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut :

Belanja Modal		2019		Lebih/ (Kurang)	2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.310.200.000	1.293.433.000	(16.767.000)	436.660.000
	Jumlah	1.310.200.000	1.293.433.000	(16.767.000)	436.660.000

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET LANCAR

Aset lancar adalah adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember.

Rincian saldo sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :

	2019 Rp.	2018 Rp.
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas dan setara kas yang diterima oleh bendahara penerima namun belum disetorkan kepada Kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember.

Rincian saldo sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :

	2019 Rp.	2018 Rp.
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan dijual atau untuk digunakan dalam proses produksi dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Persediaan :		2019 Rp	2018 Rp
a.	Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	926.500	608.000
	Jumlah	926.500	608.000

5.2.2 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya dari APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran Aset (*Exchange of Assets*).

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2019 dan 2018, tersaji sebagai berikut :

Aset :		2019	2018
		Rp	Rp
a.	Peralatan dan Mesin	6.958.608.618,00	5.423.425.618,00
b.	Aset tetap lainnya	25.348.206,00	25.348.206,00
Jumlah		6.983.956.824,00	5.448.773.824,00

a. Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018, sebagai berikut :

	2019	2018
	Rp.	Rp.
Peralatan dan Mesin	6.958.608.618,00	5.423.425.618,00
Aset tetap lainnya	25.348.206,00	25.348.206,00
JUMLAH	6.983.956.824,00	5.448.773.824,00

b. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan akumulasi nilai penyusutan masing periode yang diakui sebagai beban penyusutan. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019	2018
	Rp.	Rp.
Akumulasi Penyusutan	(4.766.785.369)	(3.945.326.236)

5.2.3 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, aset lain-lain, akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud dan Akumulasi penyusutan aset lain lain.

5.2.4 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Setelah konsolidasi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan dengan PPKD, saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :

	2019	2018
	Rp.	Rp.
Ekuitas	2.218.097.955,00	1.504.055.588,00

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Rincian Pendapatan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Pendapatan-LO		2019	2018
a.	Pendapatan retribusi daerah	17.154.000	977.432.080
	Jumlah	17.154.000	977.432.080

5.3.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Rincian Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Beban		2019	2018
	Beban	8.729.536.234	8.944.899.215
	Jumlah	8.729.536.234	8.944.899.215

Rincian beban sebagai berikut:

Beban Operasional		2019	2018
a.	Beban Pegawai	3.360.960.960	3.345.070.116
b.	Beban Persediaan	486.367.599	720.120.265
	Beban Jasa	3.413.902.923	3.381.598.020
	Beban Pemeliharaan	378.171.315	467.110.300
c.	Beban Perjalanan Dinas	510.424.300	408.104.792
d.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	579.709.137	622.895.722
Jumlah		8.729.536.234	8.944.899.215

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar Rp.1.504.055.588,00.

5.4.2 Surplus/Defisit-LO

Defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar minus Rp.8.712.382.234,00

5.4.3 Koreksi Nilai Persediaan

Jumlah Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

5.4.4 Surplus Revaluasi Aset Tetap

Jumlah Surplus revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

5.4.5 Koreksi Ekuitas Lainnya

Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.4,00.

5.4.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 Rp.2.218.097.955,00

BAB VI PENUTUP

6.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan anggaran dan realisasi dari laporan pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LRA	20.000.000	17.154.000	85,77%	977.432.080
Belanja	10.187.885.000	9.443.578.597	92,69%	8.758.682.493
Surplus/(Defisit)	(10.167.885.000)	(9.426.424.597)	92,71%	(7.781.250.413)

6.2 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019, Ringkasan Laporan Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :

Uraian	2019	2018
ASET	2.218.097.955	1.504.055.588
Aset Lancar	926.500	608.000
Aset Tetap	2.217.171.455	1.503.447.588
Dana Cadangan	0	0
Aset Lainnya	0	0
KEWAJIBAN	0	0
Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Kewajiban Jangka Pendek	0	0
EKUITAS	2.218.097.955	1.504.055.588,00

6.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan saldo Pendapatan-LO dan beban selama periode akuntansi. Ringkasan Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	Saldo (Rp.) 2019	Saldo (Rp.) 2018	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan -LO	17.154.000	977.432.080	(960.278.080)
Beban	8.729.536.234	8.944.899.215	(215.362.981)
Surplus/(Defisit)- LO	(8.712.382.234)	(7.967.467.135)	(744.915.099)

6.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Uraian	2019	2018
EKUITAS AWAL	1.504.055.588	1.690.272.303
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.712.382.234)	(7.967.467.135)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi ekuitas lainnya	4	7
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIK	9.426.424.597	7.781.250.413
EKUITAS AKHIR	2.218.097.955	1.504.055.588

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2019. Catatan Atas Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk Pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


EKO ADJI ARIANTO, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198503 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	MENAIK/ (PENURUN)	(%)
	Unsur Pemerintahan : 2				
	Bidang Pemerintahan : 2.10				
	Unit Organisasi : 2.10.01				
	Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01				
	Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
	Komunikasi dan Informatika				
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Dinas Komunikasi dan Informatika				
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	17.154.000,00	977.432.080,00	(960.278.080,00)	(98,24)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	17.154.000,00	977.432.080,00	(960.278.080,00)	(98,24)
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	17.154.000,00	977.432.080,00	(960.278.080,00)	(98,24)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sekt - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	8.729.536.234,00	8.944.899.215,00	(215.362.981,00)	(2,41)
9.1.1	Beban Pegawai	3.360.960.960,00	3.345.070.116,00	15.890.844,00	0,48
9.1.2	Beban Persewaan	486.367.599,00	720.120.265,00	(233.752.666,00)	(32,46)
9.1.2	Beban Jasa	3.413.902.923,00	3.381.598.020,00	32.304.903,00	0,96
9.1.2	Beban Pemeliharaan	378.171.315,00	467.110.360,00	(88.938.985,00)	(19,04)
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	510.434.390,00	468.104.792,00	102.319.598,00	25,07
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	579.709.137,00	622.895.222,00	(43.186.085,00)	(6,93)
9.1.8	Beban Penyelenggaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%) -
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(8.712.382.234,00)	(7.967.467.135,00)	(744.915.099,00)	9,35
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8.712.382.234,00)	(7.967.467.135,00)	(744.915.099,00)	9,35
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.712.382.234,00)	(7.967.467.135,00)	(744.915.099,00)	9,35


 Sukoharjo, 31 Desember 2019
 Pdt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

EKO ADJI ARIANTO, SH, MM
 NIP. 19610926 198503 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 10	Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2 . 10 . 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01	Dinas Komunikasi dan Informatika

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	1.504.055.588,00	1.690.272.303,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.712.382.234,00)	(7.967.467.135,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	4,00	7,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	9.426.424.597,00	7.781.250.413,00
EKUITAS AKHIR	2.218.097.955,00	1.504.055.588,00

Sukoharjo, 31 Desember 2019

PIL. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

EKO ADJI ARIANTO, SH, MM

NIP. 19610926 198503 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Belanja Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 2.10 Komunikasi dan Informatika
 Unit Organisasi : 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
4	PENDAPATAN - LRA	20.000.000,00	17.154.000,00	85,77	977.432.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	20.000.000,00	17.154.000,00	85,77	977.432.000,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	20.000.000,00	17.154.000,00	85,77	977.432.000,00
5	BELANJA	10.197.805.000,00	9.443.570.507,00	92,69	8.798.022.493,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.877.805.000,00	8.190.145.507,00	91,80	8.322.022.493,00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.856.704.000,00	3.360.960.960,00	87,15	3.345.070.116,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.020.981.000,00	4.799.184.637,00	95,58	4.976.952.377,00
5.2	BELANJA MODAL	1.319.999.999,00	1.253.425.000,00	95,72	496.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Penanaman dan Pembi	1.319.999.999,00	1.253.425.000,00	95,72	496.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.167.805.000,00)	(9.426.424.507,00)	92,71	(7.781.200.413,00)
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)	(10.167.805.000,00)	(9.426.424.507,00)	92,71	(7.781.200.413,00)

Sukoharjo, 31 Desember 2019
 Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


EKO ADI ARIANTO, SH, MM
 NIP. 196109281985031000



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
 Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
Urusan Pemerintahan : 2 - 10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	
Unit Organisasi : 2 - 10 - 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Sub Unit Organisasi : 2 - 10 - 01 - 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	926.500,00	608.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	926.500,00	608.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	8.958.608.618,00	5.423.425.618,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	25.348.206,00	25.348.206,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(4.766.785.969,00)	(3.945.326.236,00)
JUMLAH ASET TETAP	2.217.171.455,00	1.503.447.588,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	324.318.000,00	324.318.000,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(324.318.000,00)	(324.318.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
JUMLAH ASET	2.218.097.955,00	1.504.055.588,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan	: 2 - 10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi	: 2 - 10 - 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi	: 2 - 10 - 01 - 01	Dinas Komunikasi dan Informatika

URAIAN	2019	2018
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	2.218.097.955,00	1.504.055.588,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.218.097.955,00	1.504.055.588,00

